

BAB I

PENDAHULUAN

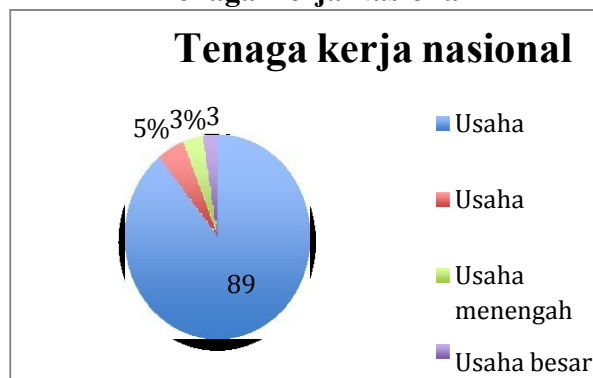
1.1. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu hal yang harus dicapai suatu negara di era globalisasi ini dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara itu sendiri mencakup perdagangan mikro dan makro. Pondasi mata pencaharian rakyat yang dapat menopang perekonomian negara tersebut adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu memberikan kontribusi terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Status UMKM dinilai sangat signifikan karena sektor ini tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga memberikan kesempatan kerja langsung dan tidak langsung terhadap orang-orang dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. UMKM merupakan salah satu industri yang digemari oleh masyarakat, karena tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulai usaha, dan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja.

UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM dapat membuka usaha dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia (Dewi, 2018).

Gambar 1.1.
Tenaga Kerja Nasional



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (2019)

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (2019), UMKM mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 119,6 juta orang pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat 2,21% dibandingkan 117 juta orang tahun lalu. Jumlah ini setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sisanya 3,08% berasal dari usaha besar. Ada 109,8 juta (89%) tenaga kerja di usaha mikro, 5,93 juta (4,81%) di usaha kecil dan 3,79 juta (3,07 %) di usaha menengah. Sementara itu, total UMKM di Indonesia tercatat 65,47 juta unit. Jumlah ini mencapai 99,99% dari total unit usaha di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui jumlah UMKM di Kota Jakarta Timur yang terdaftar mencapai 240.512 unit. Banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah, yang aktif di Kota Jakarta Timur, sehingga perlu pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui dinas dan sudin koperasi, UMKM dan perdagangan.

Tabel 1.1.
Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Jumlah UMKM
1	Jakarta Barat	272.761
2	Jakarta Timur	240.512
3	Jakarta Selatan	210.022
4	Jakarta Utara	197.179
5	Jakarta Pusat	138.304
Jumlah		1.058.778

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (2019)

UMKM juga harus siap bersaing dengan UMKM lainnya agar bisa berkembang. Sehingga para pelaku UMKM agar dapat memulai usaha yang baru dan variatif, serta diharapkan UMKM dapat berkinerja dengan baik. Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran yang potensial, namun dalam kenyataannya pengembangannya masih menghadapi banyak masalah. Menurut (Quartey, 2010), UMKM seringkali mengalami keterlambatan perkembangan karena berbagai permasalahan konvensional yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti masalah kepemilikan, kapasitas sumber daya manusia, pemasaran, pembiayaan dan berbagai masalah lain yang terkait dengan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kinerja UMKM merupakan keseluruhan hasil kerja yang dicapai dan dibandingkan dengan tujuan, hasil kerja, serta sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya (Wahyudiati, 2017). Ukuran kinerja UMKM bisa dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kinerja bersifat kuantitatif dalam bentuk hasil keuangan seperti produksi dalam hal jumlah barang yang dijual dan dalam hal biaya operasi, pemasaran dalam hal jumlah pelanggan dan efisiensi. Sedangkan ukuran kinerja bersifat kualitatif berupa kualitas pencapaian tujuan, disiplin, efektifitas, evaluasi manajemen kinerja organisasi, perilaku manusia dalam organisasi (Purnomo, 2010). Ada banyak faktor yang mendorong kinerja keuangan UMKM, salah satunya adalah akses permodalan. Dengan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlu didorong perluasan akses keuangan dan pengetahuan sektor keuangan (Yanti, 2019). Pelaku UMKM harus memahami dan mampu mengelola keuangan dengan baik agar dapat menjalankan usahanya. Sehingga, literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan produk lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan usaha (Aribawa, 2016).

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola, serta mengkomunikasikan keadaan keuangan yang memengaruhi kesejahteraannya (Lusardi, 2018). Dengan definisi tersebut, para pedagang konsumen produk, jasa keuangan dan masyarakat umum diharapkan tidak hanya perlu mengetahui dan memahami jasa keuangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Gambar 1.2.
Indeks Literasi Keuangan



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK tahun 2016 yang memiliki indeks literasi keuangan sebesar 29,7%. Dalam 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan literasi keuangan masyarakat sebesar 8,33%. Mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten, dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan golongan baik di perkotaan maupun perdesaan. Inklusi keuangan yang memberdayakan masyarakat Indonesia merupakan salah satu cara yang dapat membantu mengatasi berbagai penyebab rendahnya literasi keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan strategi literasi keuangan nasional indonesia yang telah memiliki satu kerangka edukasi keuangan untuk pengembangan produk dan layanan jasa keuangan. Sedangkan Inclusion, (2016) inklusi keuangan didefinisikan sebagai memberikan setiap orang akses terhadap produk keuangan yang relevan, seperti tabungan, kredit, pembayaran, dan asuransi, serta menampilkan akses yang berkualitas, seperti kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan dan akses pengguna juga disediakan untuk semua orang. Literasi keuangan masyarakat akan dibarengi dengan inklusi keuangan masyarakatnya. Masyarakat yang sudah mengenal dengan perusahaan jasa keuangan, memiliki pengetahuan dalam penggunaan produk dan layanan keuangan, serta memiliki kepercayaan pada perusahaan jasa keuangan yang harus didukung oleh ketersediaan akses terhadap lembaga, produk serta layanan jasa keuangan.

Gambar 1.3.
Indeks Inklusi Keuangan



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Jumlah ini meningkat dibandingkan hasil survei OJK tahun 2016 saat indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. Dalam 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan akses produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat inklusif sebesar 76,19%. Jika dibandingkan dengan literasi, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia belum meningkat secara signifikan dalam merespon peningkatan inklusi keuangan. Banyak orang Indonesia memiliki akses dan dapat memanfaatkan layanan keuangan, tetapi mereka tidak terbiasa dengan layanan tersebut dan kurang ahli dalam menggunakannya.

Ariwibawa (2016) menyatakan bahwa literasi keuangan mempunyai pengaruh positif bagi keberlangsungan dan kinerja UMKM. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Suryani, 2017) yang mengatakan bahwa literasi keuangan memiliki dampak pengaruh yang positif pada kesuksesan suatu bisnis dan kinerja usaha, sehingga perlunya pemahaman dalam tingkatan literasi keuangan demi kelangsungan usahanya. Namun, dalam penelitian (Olawale, 2010) mengatakan bahwa UKM di Negara Afrika, pemahaman literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kinerja UKM. Sedangkan penelitian (Yanti, 2019) menyatakan bahwa inklusi keuangan mempunyai pengaruh positif bagi kinerja UMKM. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Sanistasya, 2019) dan (Sajuyigbe, 2017) yang mengatakan bahwa inklusi keuangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM. Dengan mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku mereka untuk lebih meningkatkan kinerja UMKM, inklusi keuangan dapat membantu UMKM untuk berkinerja lebih baik. Cara pandang pelaku usaha terhadap uang dan keuntungan juga akan berubah, dan dengan pola pikir ini, para pelaku ekonomi akan menjadi lebih responsive.

Berdasarkan fenomena dan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji ulang penelitian dari beberapa peneliti terdahulu dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, tersebut di atas, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung?
- 2) Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung?
- 3) Apakah literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sampai sejauhmana kelayakan penelitian tersebut diatas:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja Non Keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- 1) Untuk Kepentingan Ilmu
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM.
- 2) Untuk Kebijakan Pemerintah
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan merancang strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM yang memiliki literasi keuangan dan inklusi keuangan. Serta menilai apakah upaya pemerintah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai, atau masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM.

3) Untuk Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami literasi keuangan dan inklusi keuangan.